

ABSTRAK

Pasca legalisasi aset tanah adalah program pemerintah yang merupakan bagian kelanjutan dari sertifikat tanah. Tujuannya tidak lain adalah untuk kemakmuran, kesejahteraan, hidup mandiri dan berkelanjutan. Banyak terjadi ketimpangan di dalam pelaksanaan pasca legalisasi aset tanah di berbagai bidang. dan dibidang perikanan dianggap paling lemah dan tidak berkembang serta kemakmuran masyarakatnya bisa dibilang berpenghasilan rendah. acap kali pemerintah memandang sebelah mata para masyarakat pembudidaya ikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam pembahasan masalah ini adalah metode yuridis empiris yaitu proses menganalisis terhadap permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum dengan data primer yang ditemukan di lapangan, sehingga ditemukan kenyataan hukum yang terjadi dilapangan, khususnya mengenai mekanisme program pasclegalisasi aset tanah di bidang perikanan.

Hasil penelitian yang di dapat dari permasalahan *Kesatu*, yaitu mekanisme pemberdayaan masyarakat pasca legalisasi aset tanah di bidang perikanan adalah khususnya mengenai pelaksanaan proses program sebelum pelaksanaan yaitu pemerintah melakukan pembentukan organisasi serta kerjasama, penetapan lokasi pengembangan, melakukan pemetaan sosial dan potensi yang akan dikembangkan, adanya inventarisasi pendampingan serta memberi modal pinjaman melalui agunan sertifikat tanah masyarakat pembudidaya ikan. yang dilakukan oleh lembaga terkait. antara Badan Pertanahan Nasional, Dinas Kelautan dan Perikanan serta lembaga lainnya. yang dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 serta pasal 2 ayat 3 UUPA. Kemudian permasalahan *Kedua* adalah usaha yang dilakukan pemerintah setelah pemberian modal yaitu tidak begitu saja di biarkan akan tetapi dengan melaksanakan proses lanjutan yaitu dengan melakukan pemasaran, penyaluran dan megembangkan produksi di perikanan.

Kata Kunci : *Pemberdayaan, Pasca Legalisasi, Perikanan.*

ABSTRACT

Post legalization of land assets is a government program which is a continuation part of the land certificate. The goal is none other than for prosperity, living independently and sustainably. There are many inequalities in the implementation of post legalization of land assets in various field. And in the field of fisheries it is considered the weakest and the least developed and the prosperity of its people can be said to be low income. Often the government looks at the fish farmers community.

The approach method used in the discussion of this problem is an empirical juridical method, namely the process of analyzing the problem carried out by integrating legal materials with the primary data found in the field, so that legal facts are found in the field, especially regarding the mechanism of the program after the legalization of land assets in the fisheries sector.

The result obtained from problem number one the mechanism of community empowerment after the legalization of land assets in the field fisheries are specifically regarding in the implementation of the process before implementation, namely the government establishes organization and cooperation, establishing development location, conducting social mapping and potential to be developed, providing inventory and giving loan capital through collateral for land certificates for fish farmer. Conducted by related institutions that have a memorandum. between the national land agency, the department of marine and fisheries and other institutions. Which is used as much as possible the prosperity of the people in accordance with article 33 paragraph 3 of the 1945 constitutions and article 2 paragraph 3 UUPA. Then problem number two the bussined carried out by govermenet after the provision of capital is not just let go but does a follow up process, namely by marketing distributing and developing production in the fisheries.

Keyword : *Empowerment, after the legalization, Fisheries.*